

## PENGARUH PAJAK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA 2019-2021

Christofel R.M Kowaas<sup>1</sup>, Robert R. Winerungan<sup>2</sup>, Florence O. Moroki<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email: Christopelkowaas@gmail.com

**Abstrak:** Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2021. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Populasi dan sampel berjumlah 15 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari website [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) dengan metode analisis yang berlaku adalah regresi data panel. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan secara Bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Pendapatan Asli Daerah.

**Abstract:** The aim of this research is to find out the influence of regional taxes and the results of separate regional wealth management on the original regional income of districts/cities in North Sulawesi Province for the 2019-2021 period. The sample selection technique in this research is a saturated sample. The population and sample amounted to 15 districts/cities in North Sulawesi Province. The type of data used is secondary data sourced from the website [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) with the applicable analysis method being panel data regression. The test results in this study show that regional taxes have a significant effect on local original income, whereas the results of separate regional wealth management do not have a significant effect on local original income and together have a positive and significant effect on local original income of districts/cities in North Sulawesi Province.

**Keyword:** Regional Taxes; Results Of Separated Regional Wealth Management; Regional Original Income.

### PENDAHULUAN

Menurut UU No. 1 Tahun 2022, lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dipisahkan dalam hal penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemerintah pusat telah membagi tugas dan tanggung jawabnya dengan pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan desentralisasi dimana pengelolaan daerah diserahkan secara langsung kepada pemerintah daerah. Kebutuhan dana untuk pembangunan wilayah terus meningkat, sehingga daerah-daerah terus mencari sumber dana lokal. Ini dilakukan dalam upaya untuk meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil, yang berasal dari APBN.

Semakin banyak sumber penerimaan yang berasal dari suatu daerah, semakin sedikit ketergantungan pada sumber-sumber dari luar yang bersangkutan. Selain itu, semakin banyak sumber penerimaan yang berasal dari daerah tersebut, semakin baik kesejahteraan

daerah itu sendiri. Oleh karena itu, semua daerah kabupaten dan kota di Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan PAD mereka. Merujuk pada UU No 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Berdasarkan penelitian terdahulu menurut (Denna Aprilia Ardianty, 2022), (Kireina & Octaviani, 2021), (Rizky Agustin Rizaldi, 2023) menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tentunya juga berdampak pada kesuksesan suatu daerah. Jika pendapatan daerah meningkat, maka pendapatan daerah juga meningkat, sehingga dana untuk membangun dan mengembangkan daerah akan cukup atau terpenuhi

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Ini dapat dicapai melalui penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, perusahaan milik pemerintah, dan perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. (Sri Mulyani & Ramdini, 2021). Kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Utara dari tahun 2019 sampai 2021 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan perekonomian seluruh daerah pada waktu itu, dan mulai di tahun 2021 terjadi tren peningkatan kembali.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2021 kedua mengetahui pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2021 dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi data panel sebagai tools of analysis.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pajak Daerah**

Berdasarkan UU. No 1 Tahun 2022 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Komponen pembentuk pajak daerah adalah hasil pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi + hasil pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota.

### **Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah keuntungan yang didapat dari peyerahan modal dari pemerintah daerah terhadap perusahaan - perusahaan BUMD dan BUMN, serta perusahaan milik swasta serta kelompok usaha masyarakat di daerah tersebut.

Komponen pembentuk hasil kekayaan daerah yang dipisahkan adalah laba dari penyertaan modal terhadap perusahaan milik daerah atau BUMD + laba dari penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN + laba dari penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### **Pendapatan Asli Daerah**

UU. No 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut dan diperoleh dari berbagai sumber daerah yang diatur oleh perundang-undangan daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Komponen pembentuk pendapatan asli daerah (PAD) adalah Total Hasil Pajak Daerah + Total Hasil Retribusi Daerah + Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan + Total Hasil Lain-lain PAD yang Sah.

### **Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Salah satu komponen yang membentuk pendapatan asli daerah adalah pajak daerah dan setiap kenaikan pajak daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian oleh Denna Aprilla Ardiyanti, Dirvi Surya, Seleman Hardi, dan Riszky Agustin Rizalni pada tahun 2022 dan 2023 menemukan bahwa pajak daerah berdampak positif dan signifikan pada pendapatan asli daerah.

#### **H1: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah**

### **Pengaruh Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Peningkatan pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi oleh hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini dievaluasi berdasarkan berbagai keuntungan yang diperoleh dari penyerahan modal pemerintah daerah kepada perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Sri Mulyani & Ramdini, 2021) menemukan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, pemerintah, swasta, atau kelompok usaha masyarakat.

#### **H2: Hasil Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif berupa data sekunder yang merupakan data yang sudah berbentuk angka. Jenis data dalam penelitian ini adalah data panel. Menurut Ismanto dan Pebruary (2021:110) data panel terdiri dari dua jenis data gabungan yaitu berupa data runtut waktu atau time series dan seleksi silang atau cross section. Data seleksi silang atau time series dalam penelitian ini sebanyak 15 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2021 yang dipublikasikan oleh djpk.kemenkeu.

### **Populasi dan Sampel**

Sugiyono (2021:130) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian peneliti mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Penelitian ini menganalisis data realisasi PAD 15 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2019-2021.

Seluruh data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2019 hingga 2021, yang dipublikasikan terutama di djpk.kemenkeu, diambil sebagai sampel dalam penelitian ini, yang menggunakan teknik sampling jenuh (Sugiyono 2021:133). Menurut Sugiyono (2021:131) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskriptif Statistik**

Menurut Ghozali (2021: 19), statistik deskriptif mencakup nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi yang berguna untuk memberikan gambaran umum tentang data penelitian.

Tabel 1. Deskriptif Statistik

	PD	HPKDYD	PAD
Mean	35.28378	1.637778	64.78333
Median	13.37000	1.050000	41.70000
Maximum	301.6400	5.420000	377.3800
Minimum	4.130000	0.150000	12.93000
Std. Dev.	60.82878	1.412620	72.49481
Skewness	3.214527	1.238164	2.780815
Kurtosis	12.82254	3.529510	11.08539
Jarque-Bera	258.4030	12.02359	180.5725
Probability	0.000000	0.002450	0.000000
Sum	1587.770	73.70000	2915.250
Sum Sq. Dev.	162806.2	87.80178	231241.9
Observations	45	45	45

Diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai penerimaan maximum Rp.377.38 Miliar berada di Kota Manado tahun 2021, nilai median (PAD) Rp.41.70 Miliar berada di Kota Tomohon tahun 2019 dan nilai penerimaan minimum sebesar Rp.12.93 Miliar terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021. Dan rata-rata penerimaan (mean) data pendapatan asli daerah Rp.64.78 Miliar dengan nilai standar deviasi Rp.72.49 lebih besar dari nilai mean yang berarti data bervariasi.

Diketahui Pajak Daerah (PD) memiliki nilai penerimaan maximum Rp.301,4 Miliar terdapat di Kota Manado pada tahun 2019, nilai median (PD) Rp.13.47 Miliar terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2021 nilai penerimaan minimum data sebesar Rp.4.13 Miliar terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021. Dan rata-rata penerimaan (mean) pajak daerah Rp.35.28 Miliar dengan nilai standar deviasi Rp.60.82 lebih besar dari nilai mean yang berarti data bervariasi.

Diketahui Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYD) memiliki nilai penerimaan maximum Rp.5.42 Miliar terdapat pada Kabupaten Minahasa tahun 2019, nilai median (HPKDYD) Rp.1.05 Miliar berada di Kota Kotamobagu tahun 2021, nilai penerimaan minimum data sebesar Rp.0.15 Miliar berada pada Kabupaten Talaud tahun 2020. Serta rata-rata penerimaan (mean) data Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKYD) Rp.1.63 Miliar dengan nilai standar deviasi Rp.1.41 Miliar lebih kecil dari nilai mean yang berarti data kurang bervariasi.

## Uji Penyesuaian Model

### 1. Uji Chow

**Tabel 2. Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.886676	(14,28)	0.0000
Cross-section Chi-square	76.247659	14	0.0000

(Sumber data diolah Eviews 12)

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai prob. pada cross-section chi-square ( $0.0000 < \alpha$  ( $5\% = 0.05$ )), dan  $H_0$  ditolak. Ini menunjukkan bahwa model efek tetap (FEM) adalah yang terbaik.

## 2. Uji Hausman

**Tabel 3. Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects – Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test Cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.156542	2	0.9247

(Sumber data diolah Eviews 12)

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas pada cross-section random (0.9247) lebih besar daripada  $\alpha$  ( $5\% = 0.05$ ), dan  $H_0$  tidak dapat ditolak. Dengan demikian, model efek random (REM) adalah yang terbaik.

## 3. Uji Lagrange Multiplier

**Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier**

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided(all others) alternatives			
	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	23.48280	1.417584	24.90038
	(0.0000)	(0.2338)	(0.0000)

(Sumber data diolah Eviews 12)

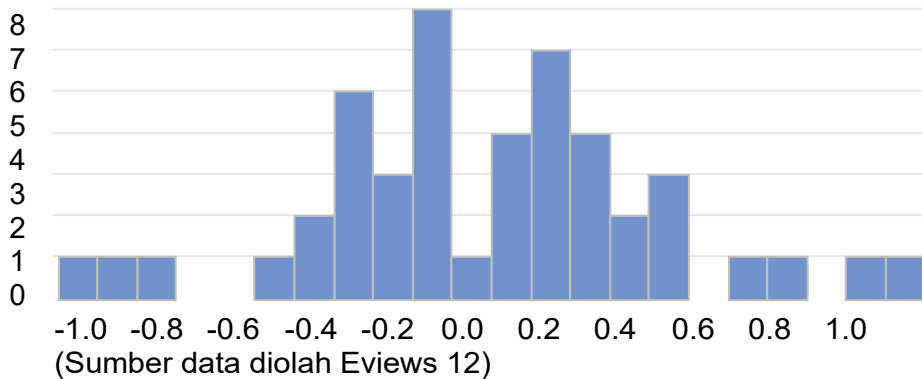
Dilihat dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai prob pada Breusch-Pagan ( $0.0000 < \alpha$  ( $5\% = 0.05$ )), yang berarti bahwa  $H_0$  tidak dapat ditolak. Dengan demikian, model efek acak (REM) adalah model yang terpilih.

## Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan tahapan hasil estimasi regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan metode Random Effect Model (REM) dengan pendekatan Generalized Least Squared (GLS), uji asumsi klasik yang berlaku adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas (Napitupulu et al., 2021: 120). Metode GLS menghasilkan estimasi terbaik linear tidak bias (BLUE), yang merupakan metode pengobatan untuk mengatasi pelanggaran asumsi homokedastisitas dan autokorelasi (Kosmaryati dkk., 2).

## Uji Normalitas

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Asumsi klasik tentang kenormalan data terpenuhi karena residual terdistribusi secara normal, dengan nilai probabilitas JB 0.880430 lebih besar dari 0,05.

## Uji Multikolonieritas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

	PD	HPKYD
PD	1.000000	0.578340
HPKYD	0.578340	1.000000

(Sumber data diolah EvIEWS 12)

Tabel di atas menunjukkan nilai koefisien korelasi antar variabel independen sebesar  $0.578340 \leq 0,85$ , yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, yang berarti tidak ada masalah multikolinieritas.

## Analisis Regresi Data Panel

Tabel 6 Hasil Estimasi Regresi Data Panel Dengan Model REM

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.64310	6.076660	3.232548	0.0024
X1	1.116742	0.081973	13.62325	0.0000
X2	3.503136	2.596937	1.348950	0.1846

Persamaan model yang berlaku dalam Random Effect Model adalah sebagai berikut:

Ket:

$Y_{it}$  = variabel dependen (Total hasil Pendapatan Asli Daerah).

$A$  = Konstanta.

$\beta_1 \beta_2$  = Koefisien Regresi.

$X1_{it}$  = Total Hasil Pajak Daerah.

$X2_{it}$  = Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.(HPKDYD)

$E_{it}$  = error

$Y_{it} = \alpha + \mu_i + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + e_{it}$

$$PAD = 19.64310 + 1.116742 PDit + 3.503136 HPKYDit + e$$

Berdasarkan model persamaan regresi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Jika variabel X (Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan) tidak berubah, maka Pendapatan Asli Daerah senilai 19.64310, menurut persamaan.
2. Koefisien Pajak Daerah (PD) = 1.116742, yang berarti bahwa setiap peningkatan PD sebanyak 1 satuan akan menghasilkan peningkatan nilai PAD sebesar 1.116742 jika variabel lain, HPKYD, tidak berubah atau konstan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKYD) = 3.503136, yang berarti bahwa setiap peningkatan variabel HPKYD sebanyak 1 satuan akan menghasilkan peningkatan nilai PAD sebesar 3.503136 jika variabel lain, PD,

### Uji t

Menurut Ghazali (2021:148), uji t digunakan untuk mengukur signifikansi koefisien secara parsial untuk menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Dalam kasus di mana tingkat signifikansi kurang dari 0,05, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 7 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.64310	6.076660	3.232548	0.0024
X1	1.116742	0.081973	13.62325	0.0000
X2	3.503136	2.596937	1.348950	0.1846

(Sumber data diolah Eviews 12)

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari output analisis regresi hasil uji t diatas dengan metode yang terpilih dalam penelitian ini yaitu Random Effect Model (REM).

Maka dapat dijelaskan signifikansi pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen adalah sebagai berikut:

### **Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara**

Pajak daerah menunjukkan nilai t statistik (+) 13.62325 dengan nilai signifikansi Prob sebesar  $0.0000 < \alpha (0,05)$ . Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari  $\alpha (0,05)$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga kesimpulannya adalah pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

### **Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKYD) mempunyai hubungan yang signifikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKYD) menunjukkan nilai t statistik (+) 1.348950 dengan nilai signifikansi Prob sebesar  $0.1846 > \alpha (0,05)$ . Karena tingkat signifikansi lebih besar dari  $\alpha (0,05)$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKYD) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

## Uji F

Uji F bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan model penelitian, menurut Ghozali (2021:148). Dengan kata lain, tujuan uji F adalah untuk menentukan apakah persamaan model regresi dapat digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Jika  $F_{statistik} \geq F_{tabel}$  dan tingkat sig  $\leq 0.05$ , maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara bersamaan. Sebaliknya, jika  $F_{statistik} \leq F_{tabel}$  dan tingkat sig  $\leq 0.05$ , maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara bersamaan.

R-squared	0.875862	Mean dependent var	20.13750
Adjusted R-squared	0.869951	S.D. dependent var	27.27871
S.E. of regression	9.837347	Sum squared resid	4064.483
F-statistic	148.1665	Durbin-Watson stat	2.160846
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.933134	Mean dependent var	64.78333
Sum squared resid	15462.28	Durbin-Watson stat	0.568010

(Sumber data diolah Eviews 12)

Berdasarkan hasil output uji F diatas dapat disimpulkan bahwa F-Statistik atau F hitung sebesar 148.1665 dengan nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0.000000. Maka dapat disimpulkan bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel ( $148.1665 > 2,015368$ ) Selain itu dilihat juga dari nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.000000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya, semua variabel mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

## Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa mampu variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai antara nol dan satu menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen sangat terbatas untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Jika nilai mendekati satu, variabel independen akan memerlukan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2021).

R-squared	0.875862	Mean dependent var	20.13750
Adjusted R-squared	0.869951	S.D. dependent var	27.27871
S.E. of regression	9.837347	Sum squared resid	4064.483
F-statistic	148.1665	Durbin-Watson stat	2.160846
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.912995	Mean dependent var	64.78333
Sum squared resid	20119.12	Durbin-Watson stat	0.795557

(Sumber data diolah Eviews 12)

Berdasarkan tabel di atas nilai adjusted R-squared sebesar 0.869951 atau 86 % persen artinya kontribusi variabel independen tingkat korelasi nya sangat kuat, sementara sisanya yaitu sebesar 14 % persen dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### **Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pajak daerah pada kab/kota di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2019-2021 memiliki efek positif dan signifikan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Menurut Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021 dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pajak daerah naik dan turun setiap tahun. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kemampuan pembayaran pajak daerah pada tahun 2020, yang mengakibatkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, tingkat efektivitas pajak daerah di semua kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara dianggap cukup baik.

Hasil menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dari pemungutan pajak daerah. Setiap tahun, setiap kenaikan penerimaan pajak daerah akan berdampak pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena kenaikan pos-pos pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian Denna Aprilla Ardiyanti, Dirvi Surya, Seleman Hardi, dan Yahawi (2022), yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, dan didukung oleh Riszky Agustin Rizalni (2023).

### **Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berdampak signifikan pada PAD Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat dan menurun setiap tahun, menurut Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021 dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Disebabkan oleh pandemi COVID-19, kinerja perusahaan daerah dan BUMD terbatas pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan pemerintah daerah dari hasil laba penyertaan modal pada perusahaan daerah dan BUMD. Rata-rata, capaian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari tahun 2019-2021 belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan alokasi dana yang dapat dialokasikan.

Temuan ini sesuai dengan penelitian Riszky Agustin Rizalni (2023) yang menyatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat secara signifikan.

### **Kesimpulan Dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah di 15 Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2021. Setelah melakukan pengujian model dari analisis data panel, ditemukan bahwa model efek acak (Random Effect) adalah yang paling cocok untuk digunakan. Hasil penelitian ini mencakup hal-hal berikut: 1) Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2021; 2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

#### **Saran**

Berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan temuan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara selain pajak daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling potensial. Pemerintah diharapkan dapat lebih meninjau kembali dan memanfaatkan sumber

dana yang tersedia untuk dialokasikan sebagai modal pendirian perusahaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baru yang memenuhi kriteria dan memiliki potensi untuk memperoleh laba dikarenakan keuntungan dari laba penyertaan modal daerah merupakan indikator untuk meningkatkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan salah satu indikator pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Peneliti yang akan datang dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi saat mereka melakukan penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka dapat menambahkan variabel tambahan selain variabel yang telah ditentukan dalam penelitian ini, serta dengan menambahkan faktor kualitatif sehingga model memiliki kedua aspek kuantitatif dan kualitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, h. (2020). Perpajakan. <https://www.penerbitsalemba.com>
- Anggraeni Zahra, E., Nugraha, & Triantoro, A. (2022). Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020. *Journal of Finance Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1(1), 51–64.
- Badar, g., & Meidy Santje Selvy Kantohe (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (pbb) di kecamatan tompaso. *Jurnal akuntansi manado (jaim)*, 334–343.
- Denna Aprilla Ardiyanti, Dirvi Surya Abbas, Seleman Hardi Yahawi, & Samino Hendriyanto. (2022). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. OPTIMAL *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 76–100. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.711>
- Hanifa, J. H., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandung Tahun 2016-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 130–142. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3371>
- Kencana, T., Aladin, A., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(08), 1144–1149. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.594>
- Langi, V., Winerungan, R., & Sumual, F. (2021). ANALISIS PARTISIPASI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SION KECAMATAN TOMPASOBARU. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 29–34. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.663>
- Patar, S., Manalu, R., Lubis, H., & Prayogi, O. (2023). ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI Upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat sering disebut sebagai upaya pembangunan . 2(1), 173–191.
- Rizaldi, B., & Guspul, A. (2021). PENGARUH PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN, PDRB, DAN INVESTASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH EKS – KARESIDENAN KEDU 2014-2018. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(1), 8–15. <https://doi.org/10.32500/jebe.v3i1.1991>
- Rizki, S. A., Nengsih, I., & Agustin, K. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 68. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i1.3269>
- Sri Mulyani, H., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019.

- J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>
- Tumanduk, S., Kawulur, A., & Bacilius, A. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA TOMOHON. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 292–301. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.1134>
- Umar, A. R. M. (2020). *Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Oleh Badan Usaha Milik Daerah*. ii + 61.
- Usman, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 1(01), 87–104.  
[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)